ANALISIS PERENCANAAN PENGANGGARAN APBD PEMERINTAH

Oleh:

¹Muhammad Imam Gazali, ²Ikbal, ³Victor Pattiasina,
⁴Ika Agustina, ⁵Eljawati

¹*Institut Pemerintahan Dalam Negeri*

*Jl. Raya Bandung - Sumedang No.Km.20, Cibeusi, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat
45363*

²*Politeknik Bombana*

Jl. Poros, Watu Mentade, Kendari, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara 93771

³*Universitas Yapis Papua*

Jl. Dr. Sam Ratulangi No.11, Trikora, Kec. Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua 99113

⁴*Institut Pemerintahan Dalam Negeri*

*Jl. Raya Bandung - Sumedang No.Km.20, Cibeusi, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat
45363*

⁵*Institut Pemerintahan Dalam Negeri*

*Jl. Raya Bandung - Sumedang No.Km.20, Cibeusi, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat
45363*

*Email: gazalimalay@gmail.com¹, Ikbaldjoekamp@gmail.com², victorpattiasina6@gmail.com³,
ika_agustina@ipdn.ac.id⁴, eljawati88@gmail.com⁵*

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine and analyze the government's APBD budget planning. This research approach collects data through literature studies, which involve reading literature from various sources including books, reports, articles, and journals using qualitative and deductive approaches. The findings in this study are that there are several stages in APBD budget planning, including the preparation of planning documents consisting of RPJPD, RPJMD, and RKPD, preparation of KUA and PPAS, preparation of RKA-SKPD, budget implementation, and administration and accountability. The effectiveness of APBD budget planning is highly dependent on the quality of planning documents, synchronization between documents (RPJPD, RPJMD, RKPD, and KUA-PPAS), internal control and supervision systems, and the commitment of regional heads to good governance. This is the main key to realizing good regional financial governance and sustainable regional development.

Keywords: *Planning, Budgeting, APBD*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perencanaan penganggaran APBD pemerintah. Pendekatan penelitian ini mengumpulkan data melalui studi literatur, yang melibatkan pembacaan literatur dari berbagai sumber termasuk buku, laporan, artikel, dan jurnal dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan deduktif. Temuan dalam penelitian ini adalah ada beberapa tahapan dalam perencanaan penganggaran APBD,

meliputi penyusunan dokumen perencanaan yang terdiri dari RPJPD, RPJMD, dan RKPD, penyusunan KUA dan PPAS, penyusunan RKA-SKPD, pelaksanaan anggaran, serta penatausahaan dan pertanggungjawaban. Efektivitas perencanaan penganggaran APBD sangat bergantung pada kualitas dokumen perencanaan, sinkronisasi antar dokumen (RPJPD, RPJMD, RKPD, dan KUA-PPAS), sistem pengendalian internal dan pengawasan, serta komitmen kepala daerah terhadap tata kelola yang baik. Hal tersebut menjadi kunci utama dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik dan pembangunan daerah yang berkelanjutan..

Kata Kunci: Perencanaan, Penganggaran, dan APBD

PENDAHULUAN

Pemerintah adalah suatu organisasi yang diberi kekuasaan untuk mengatur kepentingan Bangsa dan Negara. Lembaga pemerintah dibentuk umumnya untuk menjalankan aktivitas layanan terhadap masyarakat luas dan sebagai organisasi nirlaba yang mempunyai tujuan bukan untuk mencari keuntungan tetapi untuk menyediakan layanan dan kemampuan meningkatkan layanan tersebut di masa yang akan datang. Tujuan yang akan dicapai biasanya ditentukan dalam bentuk kualitatif, misalnya meningkatkan kenyamanan dan keamanan, mutu pendidikan, kesehatan maupun keimanan (Honga & Ilat, 2014).

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang lebih luas oleh Pemerintahan Daerah pada dasarnya sangat perlu untuk didukung oleh sumber pembiayaan yang memadai. Mengingat bahwa sumber-sumber penerimaan antara satu daerah dengan daerah yang lainnya sangat beragam. Ada beberapa daerah yang dengan sumber daya yang sudah dimilikinya sudah mampu untuk menyelenggarakan otonomi daerahnya sendiri, dan ada juga daerah yang dengan sumber daya yang kecil dimilikinya belum mampu untuk melaksanakan otonomi daerahnya sendiri. Kreativitas dan inisiatif suatu daerah dalam menggali sumber keuangan sangat tergantung pada kebijakan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah itu sendiri, di satu sisi mobilitas sumber daya keuangan untuk membiayai berbagai aktivitas daerah ini dapat meningkatkan kinerja Pemerintahan Daerah dalam menjalankan fungsinya sebagaimana yang diamanatkan dalam penerapan otonomi daerah (Yuliyah & Ardini, 2022).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki peranan yang sangat penting, karena merupakan dokumen hukum daerah yang paling jelas dalam menunjukkan perencanaan pembangunan daerah oleh Pemerintah Daerah. APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai 31 Desember. Kepala daerah dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) menetapkan prioritas dan plafon anggaran sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. Berdasarkan prioritas dan plafon anggaran kepala satuan kerja perangkat daerah menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja yang di capai. Rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah di sampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan rancangan perda tentang APBD tahun berikutnya (Kamaludin et al., 2022).

Secara umum APBD disusun untuk memperoleh gambaran lebih dalam tentang kondisi keuangan pusat/daerah serta menilai kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan dan memperkirakan kondisi keuangan di masa depan. APBD disusun dengan tujuan untuk mengatur pembelanjaan daerah dari penerimaan yang direncanakan supaya mendapat sasaran yang ditetapkan, antara lain untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat.

Salah satu bagian penting dari mekanisme pengelolaan keuangan daerah adalah perencanaan dan penganggaran. Ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan karena saling berkaitan. Perencanaan adalah suatu kegiatan penentuan tujuan organisasi dan memaparkan dengan jelas strategi-strategi, operasi dan taktik yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi secara menyeluruh (Auliana et al., 2020). Sedangkan penganggaran adalah bagian terpenting dari pengelolaan keuangan daerah yang diurus secara mandiri, sehingga aktivitas perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan semua terfokus pada penganggaran (Abdullah & Nazry, 2015).

Proses perencanaan dan penganggaran pada pemerintah daerah merupakan suatu siklus yang panjang dengan ketentuan waktu yang ketat. Proses perencanaan dan penganggaran masing-masing Pemerintah Daerah adalah berasal dari pemerintahan yang tingkatnya paling rendah yaitu kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota sampai kepada perencanaan pembangunan nasional disertai penganggarnya. Output dari perencanaan tersebut berupa rencana pembangunan jangka panjang yang dilaksanakan, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan (Primastuti, 2018).

Namun, perlu adanya integritas terhadap jadwal dari perencanaan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan batas waktu yang tertera dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 bab IV bagian kedua hingga bagian keenam tentang langkah-langkah dan jadwal perencanaan serta penganggaran APBD, keterkaitan dokumen perencanaan yang satu terhadap yang lain, serta efektif dan efisienkah solusi pemerintah daerah untuk kendala dalam perencanaan dan penganggaran APBD tahun anggaran sebelumnya untuk dilaksanakan ditahun anggaran selanjutnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah proses Penyusunan Perencanaan Penganggaran APBD Pemerintah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis perencanaan penganggaran apbd pemerintah.

TINJAUAN PUSTAKA

Perencanaan

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia (Pareda et al., 2017). Perencanaan juga dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumberdaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu untuk masa yang akan datang. (Tuasikal, 2015)

Menurut (Ashari & Hailuddin, 2015) perencanaan adalah usaha yang sadar, terorganisasi, dan terus-menerus dilakukan guna memilih alternatif yang terbaik dari sejumlah alternatif untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi sebenarnya makna perencanaan sangat tergantung pada paradigma yang dianut.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) memiliki tujuan, yaitu :

1. Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat

5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan

Menurut (Purwati et al., 2021) perencanaan dapat dilihat dalam tiga kategori, yaitu :

a. Kategori Proses

Perencanaan merupakan suatu proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan cara atau strategi dalam pencapaian tujuan tersebut.

b. Kategori Fungsi Manajemen

Perencanaan berfungsi pada kondisi dimana pimpinan menggunakan pengaruh atau wewenangnya untuk menentukan atau mengubah tujuan serta kegiatan organisasi.

c. Kategori Pengambilan Keputusan

Perencanaan adalah pengambilan keputusan jangka panjang atau yang akan datang mengenai hal yang akan dilakukan, cara pelaksanaan, dan waktu serta pelaku hal tersebut. Dalam perencanaan, keputusan yang diambil belum tentu sesuai dengan tujuan sebelumnya sehingga implementasi perencanaan tersebut akan dibuktikan pada masa yang akan datang.

Perencanaan tidak muncul dengan sendirinya tetapi harus disusun secara sistematis melalui beberapa proyeksi, yaitu sebagai berikut :

1. Penentuan tujuan (*goal setting*).
2. Penentuan target.
3. Mengetahui posisi awal perencanaan
4. Punya alternatif.
5. Perencanaan tidak boleh hanya ada satu
6. Menyusun rangkaian langkah untuk mencapai tujuan

Penganggaran

Penganggaran merupakan komponen yang penting dalam proses perencanaan. Hal ini dikarenakan, sejalan dengan proses tahapan penyusunan dan penetapan perencanaan, terdapat juga proses tahapan yaitu penyusunan kebijakan, penyusunan program, penyusunan pembiayaan, pemantauan, dan evaluasi serta penyempurnaan program (Sugiarto, 2014). Penganggaran juga diartikan sebagai rencana keuangan yaitu pendapatan dan pembiayaan, serta pengalokasian dana untuk setiap kegiatan berdasarkan dengan fungsi dan tujuan yang ingin dicapai.(Debby Veramitha F & Suwondo, 2022)

Menurut (Basri, 2013) penganggaran mempunyai 4 tujuan utama, yaitu sebagai berikut :

- a. Menyesuaikan rencana strategis.
- b. Membantu mengkoordinasikan aktivitas dari beberapa bagian organisasi.
- c. Menugaskan tanggung jawab kepada manajer, untuk mengotorisasi jumlah yang berwenang untuk mereka gunakan, dan untuk menginformasikan kepada mereka mengenai kinerja yang diharapkan dari mereka.
- d. Memperoleh komitmen yang merupakan dasar untuk mengevaluasi kinerja aktual manajer.

Menurut (Barbakem et al., 2018) pemerintah mempunyai beberapa prinsip dalam penganggaran, yaitu :

1. Penguasaan otoritas oleh legislatif, adalah anggaran harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu oleh legislatif sebelum anggaran tersebut dibelanjakan oleh pemerintah/eksekutif.

2. Komprehensif atau data yang benar, adalah anggaran harus memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah.
3. Keutuhan anggaran, adalah seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah harus didata dan terhimpun dalam dana umum atau dalam kas anggaran pemerintah.
4. Penghematan, adalah jumlah anggaran yang disetujui oleh legislatif harus digunakan oleh eksekutif secara ekonomis, efisien dan efektif.
5. Periodik atau bertahap, adalah anggaran harus disusun dalam jangka waktu tertentu yaitu jangka waktu pendek, jangka waktu menengah dan jangka waktu panjang.
6. Teratur dan akurat, adalah anggaran penerimaan dan pengeluaran harus disusun secara teratur sehingga tidak terjadi penurunan pendapatan atau berlebihan pengeluaran.
7. Jelas atau clear estimate, adalah anggaran harus disusun secara jelas, sederhana dan mudah dipahami oleh pengguna dan masyarakat.
8. Transparan dan terbuka, adalah anggaran disusun secara terbuka atau transparan serta dapat diketahui dengan mudah oleh masyarakat umum.

Menurut (Triyono et al., 2019) penganggaran mempunyai beberapa manfaat, diantaranya yaitu :

- a. Segala kegiatan dapat terarah pada pencapaian tujuan.
- b. Digunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan pegawai atau SDM.
- c. Memotivasi pegawai.
- d. Adanya rasa tanggung jawab pada pegawai.
- e. Menghindari pembayaran atau pemborosan anggaran yang dirasa kurang perlu.
- f. Sumber daya seperti tenaga kerja, peralatan, serta dana dapat dimanfaatkan seefisien mungkin.

APBD

APBD adalah instrument kebijakan yaitu sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah yang harus mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan dan akuntabilitas publik.(Rantabalik et al., 2018)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rancangan keuangan tahunan pemerintah wilayah Indonesia dan disetujui Dewan Perwakilan Rakyat daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di satu sisi menggambarkan penerimaan pendapatan daerah, dan di sisi lain menggambarkan arus dan biaya pendanaan kegiatan dan proyek pembangunan daerah.(Manumpil & Sumual, 2022)

Menurut (Karlina & Handayani, 2020) pentingnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ini di latar belakang oleh beberapa alasan, yaitu :

- a. APBD merupakan program kinerja dan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang akan ditempuh dalam satu tahun anggaran.
- b. Dalam APBD ditentukan estimasi jumlah pajak yang dibebankan kepada masyarakat di daerah yang bersangkutan
- c. APBD merupakan sarana untuk mewujudkan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab
- d. APBD memberi isi dan arti tanggung jawab kepada pemerintah daerah umumnya dan kepala daerah khususnya
- e. APBD merupakan sarana untuk melaksanakan pengawasan terhadap daerah
- f. APBD merupakan suatu pemberian kuasa kepada daerah untuk melakukan penyelenggaraan keuangan daerah dalam batas-batas tertentu.

Adapun terdapat beberapa fungsi dari APBD, diantaranya yaitu :

1. Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan
2. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja / mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Adapun struktur APBD berdasarkan permendagri nomor 13 Tahun 2006 terdiri dari 3 bagian yaitu pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. (Sinambela & Pohan, 2016)

a. Pendapatan Daerah

Penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva/penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Oleh karena itu, pendapatan dapat berupa arus kas aktiva masuk, peningkatan aktiva/pengurangan utang yang bukan berasal dari kontribusi ekuitas pemerintah daerah.

b. Belanja Daerah

Menurut IASC Framework, penurunan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus keluar/depleksi asset/terjadinya utang yang mengalokasikan berkurangnya ekuitas dana. Belanja daerah adalah pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran.

c. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran daerah yang dimaksudkan untuk menutupi deficit anggaran/sebagai alokasi surplus anggaran adanya pos pembiayaan merupakan upaya APBD makin inovatif.

Berikut adalah beberapa sumber APBD menurut (Yuliyanto et al., 2022), yaitu :

1. Retribusi
2. Pendapatan Daerah
3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
4. Pajak Cukai
5. Pajak Penghasilan
6. Dana Bagi Hasil
7. Dana Alokasi Umum
8. Dana Alokasi Khusus
9. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

METODE PENELITIAN

Metode kualitatif deduktif digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perencanaan penganggaran APBD pemerintah. Penelitian ini menggunakan konsep perencanaan, penganggaran, dan APBD sebagai unit analisisnya, dan datanya dikumpulkan melalui studi literatur dari berbagai sumber seperti laporan, buku, artikel, dan jurnal. Metode analisis kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif komparatif, yang berarti menggambarkan atau mendeskripsikan keadaan objek penelitian untuk mengetahui dan menganalisis masalah yang dihadapi oleh subjek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen utama kebijakan fiskal di tingkat pemerintah daerah yang menggambarkan rencana pendapatan dan belanja selama satu tahun anggaran. APBD bukan hanya sekadar dokumen keuangan, tetapi juga merupakan manifestasi dari prioritas pembangunan, arah kebijakan ekonomi daerah, serta bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada publik.

Dalam konteks desentralisasi fiskal yang diterapkan di Indonesia, otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas bagi pemerintah daerah untuk mengelola keuangannya sendiri. Oleh karena itu, perencanaan dan penganggaran APBD harus dilakukan secara cermat, transparan, partisipatif, serta berbasis pada prinsip akuntabilitas dan efisiensi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa alokasi anggaran dapat menjawab kebutuhan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dan menciptakan pemerataan pembangunan.

Perencanaan dan penganggaran merupakan kegiatan tahunan, dimana pemerintah daerah menyusun rencana kerja. Prinsip utama dalam kegiatan perencanaan dan penganggaran adalah menyusun dan menganggarkan prioritas kegiatan yang disepakati dengan tidak melebihi kapasitas fiskal daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu prioritas pembangunan dari proses perencanaan kedalam proses penganggaran adalah suatu kelanjutan. Oleh karena itu perencanaan dan penganggaran dalam proses pembangunan merupakan kegiatan penting dalam mata rantai guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (Ibrahim, 2014).

Aktivitas perencanaan dan penganggaran dapat dikatakan sebagai tahapan paling krusial dan kompleks dibandingkan dengan aktivitas lainnya di dalam konteks pengelolaan keuangan daerah (, et al., 2015). Hal ini bisa kita lihat dari beberapa alasan berikut ini :

1. Perencanaan (termasuk penganggaran) merupakan tahap awal dari serangkaian aktivitas (siklus) pengelolaan keuangan daerah, sehingga apabila perencanaan yang dibuat tidak baik, misalnya program/kegiatan yang direncanakan tidak tepat sasaran, maka kita tidak dapat mengharapkan suatu keluaran ataupun hasil yang baik/tepat sasaran.
2. Perencanaan melibatkan aspirasi semua pihak pemangku kepentingan pembangunan (stakeholders) baik masyarakat, pemerintah daerah itu sendiri dan pemerintah yang lebih tinggi (propinsi dan pusat) yang dilakukan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) mulai dari tingkat kelurahan/desa, dilanjutkan di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, sampai di tingkat propinsi dan nasional untuk menyerasikan antara perencanaan pemerintah kabupaten/kota/propinsi dan pemerintah pusat (perencanaan nasional).
3. Perencanaan Daerah disusun dalam spektrum jangka panjang (20 tahun) yang disebut RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah); jangka menengah (5 tahun)

- yang disebut RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah); dan jangka pendek (satu tahun) yang disebut RKPJMD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah).
4. Penyusunan APBD harus dibahas bersama oleh pemerintah daerah dengan DPRD dan setelah disetujui bersama kemudian harus dievaluasi oleh pemerintah yang lebih tinggi (pemerintah provinsi/pemerintah pusat c.q. Menteri Dalam Negeri).
 5. Anggaran mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran yang diharapkan, (M. Hafizullah Abduh, 2018) mengemukakan lima prinsip penganggaran yang harus dipegang teguh oleh para pihak yang terkait dalam penganggaran APBD. Kelima prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. Transparansi dan akuntabilitas anggaran

APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan. Anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat. Masyarakat juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

2. Disiplin anggaran

Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan pada setiap pos/pasal merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan/proyek yang belum/tidak tersedia anggarannya dalam APBD/perubahan APBD.

3. Keadilan anggaran

Pemerintah daerah wajib mengalokasikan penggunaan anggarannya secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan karena pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui peran serta masyarakat.

4. Efisiensi dan efektivitas anggaran

Penyusunan anggaran hendaknya dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan, dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan dan kesejahteraan yang maksimal untuk kepentingan masyarakat.

5. Disusun dengan pendekatan kinerja

APBD disusun dengan pendekatan kinerja, yaitu mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (output/outcome) dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan. Hasil kerjanya harus sepadan atau lebih besar dari biaya atau input yang telah ditetapkan. Selain itu harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi kerja yang terkait.

Tahapan Perencanaan dan Penganggaran APBD

Proses perencanaan dan penganggaran APBD bersifat siklikal, dimulai dari perencanaan pembangunan daerah hingga evaluasi dan pertanggungjawaban. Proses ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu :

1. Penyusunan Rencana Pembangunan

Rangkaian penyusunan APBD diawali dengan perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan, yang dituangkan dalam dokumen sebagai berikut :

a. RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah)

RPJPD adalah dokumen perencanaan jangka panjang yang sangat strategis dalam siklus perencanaan dan penganggaran APBD. Dokumen ini memberikan arah pembangunan selama 20 tahun dan menjadi acuan utama dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) dan tahunan (RKPD).

b. RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah lima tahunan yang sangat krusial dalam perencanaan dan penganggaran APBD. Ia menjabarkan visi-misi kepala daerah ke dalam kebijakan dan program strategis yang harus didanai dan dilaksanakan melalui APBD.

c. RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan tahunan yang sangat penting dalam perencanaan dan penganggaran APBD. RKPD menjabarkan arah kebijakan RPJMD ke dalam prioritas tahunan yang operasional dan terukur, yang kemudian dianggarkan dalam APBD.

2. Penyusunan KUA dan PPAS

a. KUA (Kebijakan Umum Anggaran)

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) merupakan dokumen strategis dalam perencanaan dan penganggaran APBD yang berfungsi sebagai dasar penyusunan PPAS dan APBD. KUA memuat kebijakan umum pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang disusun berdasarkan RKPD.

b. PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara)

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah dokumen penting dalam proses penyusunan APBD. PPAS disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan menjadi dasar untuk menyusun Rancangan APBD. PPAS memuat arah kebijakan penganggaran yang lebih teknis, mencantumkan prioritas pembangunan daerah dan pagu indikatif anggaran untuk setiap program dan kegiatan pemerintah daerah.

3. Penyusunan RKA-SKPD

RKA-SKPD adalah dokumen yang sangat krusial dalam perencanaan dan penganggaran APBD, karena mendetailkan rencana kerja dan anggaran untuk setiap SKPD yang akan melaksanakan program-program pembangunan daerah.

4. Pelaksanaan Anggaran

Pelaksanaan anggaran dilakukan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). DPA adalah elemen penting dalam perencanaan dan penganggaran APBD, karena dokumen ini memastikan bahwa anggaran yang telah disetujui dalam APBD dapat direalisasikan dengan baik, sesuai dengan peruntukan, dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

5. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban

Penatausahaan dan pertanggungjawaban merupakan pilar penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik (*good governance*). Penatausahaan mencatat dan mengelola semua transaksi keuangan secara tertib dan sistematis, sementara pertanggungjawaban menjadi bentuk laporan resmi kepada DPRD dan publik atas pelaksanaan anggaran yang telah direncanakan.

Analisis Perencanaan Penganggaran APBD Pemerintah

Analisis menunjukkan bahwa efektivitas perencanaan penganggaran APBD sangat bergantung pada kualitas dokumen perencanaan, sinkronisasi antar dokumen (RPJPD, RPJMD, RKPD, dan KUA-PPAS), sistem pengendalian internal dan pengawasan, serta komitmen kepala daerah terhadap tata kelola yang baik.

1. Kualitas Dokumen Perencanaan

Kualitas dokumen perencanaan merupakan elemen fundamental dalam memastikan perencanaan dan penganggaran berjalan efektif, efisien, dan akuntabel. Dokumen yang konsisten, terukur, partisipatif, dan responsif akan menghasilkan APBD yang pro-rakyat, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas dokumen perencanaan harus menjadi komitmen bersama antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat.

2. Sinkronisasi Antar Dokumen (RPJPD, RPJMD, RKPD, dan KUA-PPAS)

Sinkronisasi antar dokumen (RPJPD, RPJMD, RKPD, dan KUA-PPAS) merupakan fondasi utama dalam menjamin keberhasilan perencanaan dan penganggaran di daerah. Dokumen yang tersusun secara terintegrasi, konsisten, dan selaras akan menghasilkan APBD yang benar-benar mencerminkan prioritas pembangunan daerah dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata. Tanpa sinkronisasi, proses anggaran rentan menjadi tidak efektif, tidak efisien, dan sulit dipertanggungjawabkan.

3. Sistem Pengendalian Internal dan Pengawasan

Sistem Pengendalian Internal dan Pengawasan adalah dua instrumen penting yang menjamin akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas dalam perencanaan dan penganggaran APBD. Sistem pengendalian internal berperan dalam membangun tata kelola yang mencegah kesalahan sejak dini, sementara pengawasan (baik internal maupun eksternal) memastikan bahwa anggaran dilaksanakan sesuai aturan dan mencapai tujuan yang telah direncanakan. Tanpa pengendalian dan pengawasan yang kuat, risiko penyimpangan anggaran, korupsi, atau pemborosan akan meningkat, dan tujuan pembangunan daerah sulit tercapai secara optimal.

4. Komitmen Kepala Daerah Terhadap Tata Kelola Yang Baik

Komitmen kepala daerah terhadap tata kelola yang baik merupakan elemen kunci dalam perencanaan dan penganggaran APBD yang efektif, efisien, dan akuntabel. Komitmen ini memastikan bahwa proses perencanaan anggaran tidak hanya berbasis pada kepentingan politik atau administratif, tetapi benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat dan mendukung tujuan pembangunan daerah. Dengan demikian, tata kelola yang baik akan mendorong tercapainya kesejahteraan rakyat, memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah, dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

PENUTUP

Kesimpulan

Perencanaan penganggaran APBD adalah proses strategis yang menghubungkan perencanaan pembangunan dengan alokasi anggaran. Proses ini memastikan bahwa dana publik digunakan untuk program dan kegiatan yang benar-benar prioritas, bermanfaat bagi masyarakat, serta sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

Adapun 5 prinsip yang harus di pegang teguh oleh para pihak terkait dalam penganggaran APBD, meliputi transparansi dan akuntabilitas anggaran, disiplin anggaran,

keadilan anggaran, efisiensi dan efektivitas anggaran, serta disusun dengan pendekatan kinerja.

Proses perencanaan dan penganggaran APBD bersifat siklikal, dimulai dari perencanaan pembangunan daerah hingga evaluasi dan pertanggungjawaban. Proses ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu penyusunan dokumen perencanaan yang terdiri dari RPJPD, RPJMD, dan RKPD, penyusunan KUA dan PPAS, penyusunan RKA-SKPD, pelaksanaan anggaran, serta penatausahaan dan pertanggungjawaban.

Perencanaan penganggaran APBD adalah proses vital dalam pelaksanaan otonomi daerah. Kualitas perencanaan akan sangat menentukan efektivitas pelaksanaan anggaran dan keberhasilan pembangunan daerah. Oleh karena itu, melalui sinergi antara kualitas dokumen perencanaan, sinkronisasi antar dokumen (RPJPD, RPJMD, RKPD, dan KUA-PPAS), sistem pengendalian internal dan pengawasan, serta komitmen kepala daerah terhadap tata kelola yang baik menjadi kunci utama dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- , S., Winarwati, I., & Rusdiana, E. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Dan Penganggaran Apbd Di Kabupaten Bangkalan. *Yustisia Jurnal Hukum*, 4(2), 10–17. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v4i2.8658>
- Abdullah, S., & Nazry, R. (2015). Analisis Varian Anggaran Pemerintah Daerah: Penjelasan Empiris dari Perspektif Keagenan. *Research Gate, February 2014*, 1–19.
- Ashari, M., & Hailuddin. (2015). Analisis Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kabupaten Lombok Utara (Studi Kasus Perencanaan Partisipatif Tahun 2009-2013). *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 6(2), 163–180. <https://doi.org/10.22212/jekp.v6i2.354>
- Auliana, W., Amin, M., & Anwar, S. A. (2020). Analisis Perencanaan Anggaran dan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2018. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 9(05), 14–29. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/8059>
- Barbakem, D. I., Tinangon, J. J., & Sabijono, H. (2018). Analisis Perencanaan Dan Penganggaran Untuk Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Badan Keuangan Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2015. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 13(01), 1–13. <https://doi.org/10.32400/gc.13.01.18819.2018>
- Basri, R. (2013). Analisis Penyusunan Anggaran Dan Laporan Realisasi Anggaran Pada Bpm-Pd Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, 1(4), 202–212.
- Debby Veramitha F, & Suwondo, S. (2022). Analisis Perencanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung Tahun Anggaran 2019. *Indonesian Accounting Research Journal*, 2(2), 183–195. <https://doi.org/10.35313/iarj.v2i2.3463>
- Honga, A. F., & Ilat, V. (2014). Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bitung. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(4), 278–288.

<https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.2.4.2014.6263>

- Ibrahim, I. (2014). Perencanaan Penganggaran Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 15(01), 98–111. <https://doi.org/10.29040/jap.v15i01.215>
- Kamaludin, K., Arman, A., & Dunggio, S. (2022). Analisis Sinergi Eksekutif Dan Legislatif Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD Di Kabupaten Kolaka Utara. *Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, 1(1), 01–17. <https://doi.org/10.59713/jipik.v1i1.16>
- Karlina, A., & Handayani. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan APBD Kota Surabaya tahun 2012-2015. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(3), 911–912. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/988>
- M. Hafizullah Abduh. (2018). *Analisis Perencanaan Anggaran Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan pada Pemerintah Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan*. 367–388.
- Manumpil, A., & Sumual, F. M. (2022). Analisis Perencanaan Keuangan APBD Pada Badan Keuangan Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2018. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 3(2), 157–166. <https://doi.org/10.53682/jaim.v3i2.3027>
- Pareda, M., Sondakh, J. J., & Ilat, V. (2017). Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(2), 268–279. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.18431>
- Primastuti, A. (2018). *Evaluasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran*. 41–56.
- Purwati, I., Arisyahidin, A., & Talkah, A. (2021). Analisis Perencanaan Dan Pelaksanaan Anggaran, Sumber Daya Manusia, Pengadaan Barang Jasa Dan Lingkungan Birokrasi Terhadap Penyerapan Anggaran Di Kabupaten Kediri. *Otonomi*, 21(2), 244. <https://doi.org/10.32503/otonomi.v21i2.2046>
- Rantebalik, B., Tawakkal, T., & S, A. S. (2018). Analisis Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Pemerintah Kabupaten Tana Toraja. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 9(2), 192–207. <https://doi.org/10.35448/jrat.v9i2.4305>
- Sinambela, E., & Pohan, A. K. R. (2016). Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis*, 53(9), 1689–1699. journal.umsu.ac.id/index.php/akuntan/article/download/2056/2050
- Sugiarto, T. (2014). Analisis Perencanaan Dan Penganggaran Pendidikan Di Kabupaten Solok Selatan. *PAKAR Pendidikan*, 12(2), 165–179. <https://doi.org/10.24036/pakar.v12i2.145>
- Triyono, N., Kalangi, L., & Alexander, S. (2019). Evaluasi Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran di Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(3), 4017–4025. <https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.v7i3.24941>

- Tuasikal, A. (2015). Fenomenologis Perencanaan Dan Penganggaran Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 11(2), 78. <https://doi.org/10.19184/jauj.v11i2.1266>
- Yuliyah, P. L. R., & Ardini, L. (2022). Analisis Kinerja Pelaksanaan Apbd Kota Surabaya Tahun 2016-2020. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 10(2), 118–128. <https://doi.org/10.21067/jrma.v10i2.6653>
- Yuliyanto, W., Uswatun Khasanah, & Riza Umami. (2022). Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Anggaran APBD Terhadap Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Abc Periode 2018-2020. *Jurnal E-Bis*, 6(2), 456–468. <https://doi.org/10.37339/e-bis.v6i2.989>